

SISTEM NILAI TUKAR MATA UANG DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Sri Sulasmiyati

Dosen Jurusan Administrasi Bisnis
FIA Universitas Brawijaya

Abstract

In globalization era foreign money is one of the most important things in the human daily economic life. It is used not only for paying or buying something, but also for goods itself. The government policy to regulate foreign exchange rate (kurs) system is also very important. The influential of this policy in one country's economic condition and business transactions is very crucial too. Indonesia as one of a Small-Opened Economy Country needs an appropriate foreign exchange rate system to encourage economic condition's growth. Since 1970s Indonesia had been implemented three exchange rate systems. That are: Fixed Exchange System (1970 – 1978), Managed Floating Exchange Rate System (1978 – July 1997) Freely Floating Exchange Rate System (since 14 August 1997).

Keywords: *Exchange rate system, small-opened economy country, Indonesia's exchange rate systems*

Pendahuluan

Di era globalisasi dan dibukanya suatu perekonomian terhadap hubungan luar negeri mempunyai konsekuensi yang luas terhadap perekonomian dalam negeri. Arus modal dan uang mengalir sangat deras tanpa mengenal kewarganegaraan pemiliknya dan tanpa batas wilayah (*borderless*). Kondisi perekonomian sebuah negara sangat berpengaruh pada negara lain di sekitarnya dan seluruh dunia umumnya.

Dengan adanya konsep nilai tukar mata uang maka nilai mata uang suatu negara sangat berpengaruh terhadap mata uang negara lainnya. Uang yang dulu diciptakan

sebagai alat tukar guna memperlancar perdagangan yang semakin berkembang pesat, sekarang ini sudah dijadikan barang dagangan itu sendiri. Terlebih lagi mata uang asing merupakan salah satu alat atau benda ekonomi yang berpengaruh atas pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan manusia modern dan global pada saat ini, baik secara perorangan maupun berkelompok dalam keluarga, perusahaan, maupun negara.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatur masalah pertukaran mata uang asing sangat berpengaruh dalam perekonomian umumnya dan dunia usaha pada khususnya. Salah satu pertimbangan negara dalam menentukan

sistem nilai tukar mata uangnya adalah bentuk perekonomian negara. Indonesia yang termasuk dalam negara berkembang adalah negara dengan perekonomian kecil dan terbuka (*Small-Opened Economy Country*). Negara yang perekonomiannya kecil adalah negara yang perekonomian nasionalnya belum maju, dalam arti peran dan pengaruh negara tersebut dalam perekonomian global tidak cukup besar. Sedangkan yang dimaksud dengan negara dengan perekonomian terbuka (*open economy country*) adalah suatu negara yang telah membuka diri terhadap dunia internasional dengan melakukan berbagai transaksi perdagangan – baik barang dan jasa – maupun transaksi modal dengan pihak luar negeri, serta telah mengintegrasikan diri ke dalam kancah perekonomian global.

Sistem nilai tukar yang dipergunakan Indonesia haruslah memiliki kemampuan mengendalikan nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang asing, sehingga dapat membuat nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang asing menjadi lebih rendah, agar meningkatkan volume ekspor. Hal ini membuka peluang bagi campur tangan pemerintah atau pemegang otoritas moneter dengan menerapkan sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate system*) ataupun sistem nilai tukar mengambang (*managed exchange rate system*) bebas atau terkendali atau sejenisnya. Selain itu, pengendalian nilai tukar ini juga dimaksudkan untuk menarik modal asing dari luar negeri dalam rangka membiayai pembangunan nasional.

Sistem Nilai Tukar (Kurs)

Setiap negara memiliki sebuah mata uang yang menunjukkan harga-harga barang dan jasa. Kurs memainkan peranan sentral dalam perdagangan internasional, karena kurs memungkinkan kita untuk membandingkan harga-harga segenap barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai negara.

Pihak perusahaan dan rumah tangga menggunakan kurs untuk menerjemahkan harga-harga luar negeri ke dalam satuan nilai mata uang domestik.

Definisi Nilai Tukar (Kurs)

Uang masing-masing negara memiliki harga yang diukur oleh negara-negara lain. Hal inilah yang disebut nilai tukar (*exchange rate*). Menurut Peter H. Lindert dan Charles P. Kindleberger (1993:336): Nilai tukar/kurs (*exchange rate*) adalah satu jenis harga atau nilai uang suatu negara. Jenis lainnya adalah daya belinya atas barang dan jasa pada saat itu. Jenis harga kedua ini, yang disebut pula "nilai rupiah", adalah sama dengan biaya uang untuk membeli sejumlah barang atau jasa. Jenis ketiga harga uang adalah biaya penggunaan, dan akses terhadapnya, untuk periode waktu tertentu. Harga ini (secara kasar) adalah tingkat bunga yang di bayarkan peminjam untuk pemakaian uang, dan ini analog dengan harga-harga "penggunaan" lainnya, seperti harga sewa sebuah apartemen atau mobil.

Sedangkan menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus (1996:450) secara sederhana kurs (nilai tukar) valuta asing adalah harga mata uang negara asing dalam satuan mata uang domestik.

Kurs suatu mata uang akan berfluktuasi sesuai dengan permintaan dan penawaran mata uang tersebut. Namun dalam prakteknya, hal itu akan tergantung pada bentuk pasar valas tersebut yang mana bentuk pasar valas ini akan dipengaruhi oleh macam *exchange ratenya*.

Macam-macam sistem nilai tukar (kurs) Valas

Sistem nilai tukar menunjukkan suatu kumpulan peraturan, rencana dan lembaga tempat di mana pembayaran dilakukan dan diterima untuk transaksi yang melewati batas-

batas nasional. Pada umumnya di dunia ini dikenal 3 jenis sistem nilai tukar yang utama, yaitu:

a. Sistem Kurs Tetap/stabil (*fixed exchange system*)

Era *fixed exchange rate system* ditandai dengan berlakunya *Bretton Woods System* sejak 1 Maret 1947. Sistem ini menuntut agar nilai suatu mata uang dikaitkan atau *convertible* terhadap emas atau *gold exchange standard*. Pada waktu itu, mata uang dolar AS menjadi acuan (*numeraire*), di mana semua mata uang yang terikat dengan sistem ini dikaitkan dengan USD. Untuk mencipta uang senilai \$35, *Federal Reserve Bank* (Bank Sentral Amerika) harus mem-backup dengan emas senilai 1 ounce atau 28,3496 gram. Dengan demikian, nilai mata uang secara tidak langsung dikaitkan dengan emas melalui USD. Namun ternyata, *The Fed* tergiur mencipta dollar melebihi kapasitas emas yang dimiliki. Akibatnya, terjadi krisis kepercayaan masyarakat dunia terhadap dolar AS. Hal tersebut ditandai dengan peristiwa penukaran dollar secara besar-besaran oleh negara-negara Eropa. Adalah Perancis, pada masa pemerintahan *Charles de Gaulle*, negara yang pertama kali menentang hegemoni dollar dengan menukarkan sejumlah 150 juta dollar AS dengan emas. Tindakan Perancis ini kemudian diikuti oleh Spanyol yang menarik sejumlah 60 juta dollar AS dengan emas. Praktis, cadangan emas di *Fort Knox* berkurang secara drastis. Ujungnya, secara sepihak, Amerika membatalkan *Bretton Woods System* melalui Dekrit Presiden Nixon pada tanggal 15 Agustus 1971, yang isinya antara lain, USD tidak lagi dijamin dengan emas. 'Istimewanya', dollar tetap menjadi mata uang internasional untuk cadangan devisa negara-negara di dunia. Pada titik ini, berlakulah sistem baru yang disebut dengan *floating exchange rate*.

Yang terkenal dari sistem nilai tukar tetap ini adalah standar emas atau *gold standart* sebagaimana sejarahnya telah dideskripsikan. Dalam standar ini negara-negara mempertahankan nilai mata uang dalam hubungan yang telah ditentukan, dengan disertai syarat adanya penjualan dan pembelian emas pada harga yang konstan. Bila semua mata uang di dunia mempunyai hubungan yang konstan dengan emas, maka semua mata uang itu akan mempunyai yang konstan pula satu sama lain.

Bentuk lain dalam sistem nilai tukar tetap adalah pemerintah menetapkan tingkat kurs mata uang negara tersebut dengan mata uang negara lain. Dalam hal ini Bank Sentral setiap negara melakukan intervensi pada bursa valas untuk mencegah penyimpangan nilai tukar dari nilai nominal yang telah ditetapkan dan berusaha untuk mempertahankannya dengan berbagai kebijaksanaan secara sadar. Macam kebijakan ini bisa berupa (a) tindakan-tindakan tidak langsung berupa pembelian mata uang sendiri dengan mata uang asing oleh Bank Sentral apabila kurs di pasar merosot di bawah tingkat yang ditetapkan atau sebaliknya penjualan mata uang sendiri apabila tingkat kurs di pasar melonjak di atas tingkat yang ditentukan, (b) tindakan-tindakan langsung berupa penjabatan devisa pada tingkat kurs yang ditetapkan.

b. Sistem Kurs Mengambang (*Floating Exchange Rate System*)

Floating exchange rate atau sistem kurs mengambang adalah sistem yang ditetapkan melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran di bursa valas dan sama sekali tidak dijamin logam mulia. Pemerintah melalui Bank Sentral bebas menerbitkan sejumlah berapapun uang. Hal inilah yang menyebabkan nilai mata uang cenderung terdepresiasi, baik terhadap mata uang kuat (*hard currency*) maupun terhadap

harga barang. Kondisi ini kemudian diperparah oleh aksi spekulasi yang mengakibatkan nilai mata uang berfluktuasi secara bebas. Meski bisa dikendalikan melalui intervensi—yang dikenal dengan *managed floating*, otoritas pemerintah suatu negara cenderung menghindari hal ini karena membutuhkan sumber daya yang sangat besar yang berupa cadangan devisa. Berakhirnya *fixed exchange rate* dan bermulanya *floating exchange rate*, konon ditengarai sebagai awal dari berbagai rangkaian kesulitan moneter yang dikenal dengan “krisis moneter internasional” (Haundy Hady, 2001).

Secara garis besar sistem kurs mengambang ini ada dua macam:

(1) Sistem Kurs Mengambang Murni (*Freely Floating Exchange Rate System*)

Dalam sistem ini nilai tukar atau *foreign exchange rate* suatu mata uang atau valas ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran sampai terjadi keseimbangan di pasar valuta asing. Penentuan kurs valas di bursa valas tersebut terjadi tanpa campur tangan pemerintah dan oleh sebab itu kebijakan moneter lebih independent.

(2) Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali (*Managed Floating Exchange Rate*)

Sistem nilai tukar mengambang terkendali adalah mengambangkan nilai tukar tetapi berbagai intervensi kebijakan masih dipakai untuk menjaga agar nilai tukar tersebut berada dalam target yang ditentukan. Misalnya dengan membuat penentuan *band* (rentang) nilai tukar.

c. *Pegged Exchange Rate System*

Pegged exchange rate ditetapkan dengan jalan mengaitkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu yang biasanya merupakan mata uang kuat (*hard currency*). Sistem ini pernah dijalankan antara lain oleh negara-negara Afrika serta Eropa. Secara hakikat, sistem ini tak

jauh beda dengan *floating exchange rate system*. Hal ini dikarenakan mekanisme *hard currency* sebagai mata uang yang dipagu (*pegged*) masih ditentukan melalui kekuatan *supply* dan *demand* pada bursa valas dalam hal mata uang yang dijadikan sebagai acuan.

Fungsi Nilai Tukar (Kurs)

Penentuan sistem nilai tukar merupakan suatu hal penting bagi perekonomian suatu negara karena hal tersebut merupakan satu alat yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengisolasi perekonomian suatu negara dari gejolak perekonomian global. Pada dasarnya kebijakan nilai tukar yang ditetapkan suatu negara mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

- Untuk mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran, dengan sasaran akhir menjaga kecukupan cadangan devisa. Oleh karena itu, dalam menetapkan arah kebijakan nilai tukar tersebut diutamakan untuk mendorong dan menjaga daya saing ekspor dalam upaya untuk memperkecil defisit *current account* atau memperbesar surplus *current account*.
- Untuk menjaga kestabilan pasar domestik. Fungsi ini untuk menjaga agar nilai tukar tidak dijadikan alat untuk spekulasi, dalam arti bahwa dalam hal nilai tukar suatu negara mengalami *overvalued* maka masyarakat akan mendorong membeli valas, dan sebaliknya apabila *undervalued* maka masyarakat akan akan mendorong menjual valas.
- Sebagai instrumen moneter khususnya bagi negara yang menerapkan suku bunga dan nilai tukar sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Dalam fungsi ini depresiasi dan apresiasi nilai tukar digunakan sebagai alat untuk sterilisasi dan ekspansi jumlah uang beredar.

- d. Sebagai *nominal anchor* dalam pengendalian inflasi. Nilai tukar banyak digunakan oleh negara-negara yang mengalami *chronic inflation* sebagai *nominal anchor* baik melalui pengendalian depresiasi nilai tukar maupun dengan mem-peg-kan nilai tukar suatu negara dengan satu mata uang asing. (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Volume 1/No.2, Edisi September 1998:73).

Dasar Pertimbangan Penetapan Nilai Tukar

Pemilihan rezim nilai tukar pada umumnya didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti:

- a. Tingkat keterbukaan perekonomian suatu negara terhadap perekonomian global. Apakah suatu negara lebih cenderung menerapkan kebijakan ekonomi yang terbuka atau tertutup. Dalam hal suatu negara lebih cenderung menganut ekonomi yang lebih tertutup dan ingin mengisolasi gejolak keuangan dari negara lain (*contagion effect*) maka *fixed exchange rate* merupakan prioritas utama. Sementara apabila suatu negara lebih condong terbuka maka pilihan nilai tukar yang lebih fleksibel merupakan pilihan utama karena dengan sistem ini *capital inflow* dapat disterilisasi melalui sistem tersebut.
- b. Tingkat kemandirian suatu negara dalam melaksanakan kebijaksanaan ekonomi di dalam negeri. Misalnya dalam hal melaksanakan kebijakan moneter yang independen, maka sistem nilai tukar fleksibel merupakan pilihan utama.
- c. Aktivitas perekonomian suatu negara. Semakin besar skala ekonomi suatu negara berarti semakin besar kegiatan volume transaksi ekonomi sehingga permintaan akan uang juga semakin meningkat. Dalam hal ini, sistem yang tepat digunakan adalah sistem nilai tukar

fleksibel karena jika negara tersebut memiliki sistem nilai tukar tetap maka dibutuhkan cadangan devisa yang sangat besar untuk menjaga kredibilitas sistem nilai tukar tersebut. (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 1/No.2, Edisi September 1998:174).

Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah negara yang perekonomiannya kecil karena peranan dan pengaruhnya dalam kancah perekonomian global tidak cukup besar. Disamping itu menurut Krugman and Obstfeld (2000) sebagai salah satu negara yang sedang berkembang memiliki karakteristik struktural sebagai berikut:

1. Kontrol pemerintah terhadap perekonomian relatif lebih dominan. Termasuk dalam hal kepemilikan saham serta pengontrolan terhadap perusahaan-perusahaan besar dan strategis tingkat konsumsi pemerintah yang tinggi ditinjau dari prosentase GNP-nya kontrol langsung terhadap banyak hal dalam transaksi keuangan internal.
2. Memiliki sejarah tingkat inflasi yang relatif tinggi, salah satu sebabnya karena masih adanya kendala-kendala struktural (*structural bottleneck*) dalam perekonomian nasional, yang menyebabkan terjadinya *inflationary gap* dalam jangka panjang.
3. Masih lemahnya lembaga-lembaga pemberi kredit, termasuk bank dan lembaga keuangan bukan bank, dalam hal pembiayaan kredit maupun kualitas pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan kredit oleh para debitornya. Seringkali industri perbankan nasional memberikan kredit pada proyek-proyek yang beresiko relatif tinggi dengan persyaratan kredit yang kurang memadai, sehingga banyak sekali terjadi kredit macet, yang akhirnya sangat mengganggu kesehatan industri perbankan nasional.
4. Relatif membatasi fluktuasi nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang asing,

dengan menggunakan sistem nilai tukar valuta asing yang cenderung tetap (*fixed*), serta melakukan pengendalian secara ketat terhadap pergerakan modal internasionalnya (*international capital movement*). Dengan tujuan utama, memacu pertumbuhan ekspor dan pembatasan impor barang dan jasa untuk mengurangi defisit neraca pembayarannya, serta mempertinggi laju pertumbuhan ekonominya dengan cara memperbanyak aliran modal masuk (*capital inflow*).

5. Transaksi eksporannya sebagian besar masih bertumpu pada komoditas pertanian dan hasil sumberdaya alam (pertambangan, kehutanan, dan sebagainya), karena relatif belum berkembangnya sektor industri di negara tersebut.
6. Relatif masih tingginya angka kemiskinan dan tindak korupsi, sebagai akibat dari tingkat pendidikan yang relatif rendah, ketidakmerataan dalam redistribusi pendapatan, dan sistem birokrasi yang cenderung sentralistik.

Kebijakan Penentuan Sistem Nilai Tukar (Kurs) Di Indonesia

Sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Secara garis besar, sejak tahun 1970 Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitu :

1. Sistem Nilai Tukar Tetap (1970 - 1978)

Sesuai dengan Undang-undang No. 32 tahun 1964, Indonesia menganut sistem nilai tetap dengan kurs resmi Rp. 250 per 1 USD (sebelumnya Rp. 45 per 1 USD), sementara kurs mata uang lainnya dihitung berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap USD di bursa valuta asing Jakarta dan di pasar Internasional.

Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem kontrol devisa yang relatif ketat. Para eksportir diwajibkan menjual hasil devisanya kepada bank devisa untuk selanjutnya dijual kepada pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia. Namun demikian, dalam rezim ini tidak ada pembatasan dalam hal kepemilikan, penjualan maupun pembelian valuta asing. Sebagai konsekuensi kewajiban penjualan devisa tersebut maka Bank Indonesia harus dapat memenuhi seluruh kebutuhan valuta asing bank komersial untuk memenuhi permintaan para importir maupun masyarakat yang membutuhkan valuta asing. Pada masa tersebut, pemerintah mem-peg-kan rupiah terhadap US dolar, dimana penentuan nilai tukar mutlak dilakukan oleh pemerintah atas dasar kurs nilai tukar riil. Dengan sistem nilai tukar tetap ini, Bank Indonesia memiliki wewenang penuh dalam mengawasi transaksi devisa. Sementara untuk menjaga kestabilan nilai tukar pada tingkat yang telah ditetapkan, Bank Indonesia melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing.

2. Sistem Kurs Mengambang Terkendali (1978 - Juli 1997)

Pada sistem ini nilai tukar rupiah diambangkan terhadap sekeranjang mata uang (*basket of currencies*) negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Kebijakan ini diimplementasikan bersamaan dengan dilakukannya devaluasi rupiah pada tahun 1978 sebesar 33,6%. Dengan sistem tersebut, pemerintah menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs rupiah bergerak di pasar dengan *spread* tertentu. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, pemerintah melakukan intervensi bila kurs bergejolak melebihi batas atas atau batas bawah dari *spread*.

Dalam pelaksanaannya, sistem ini mempunyai esensi yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik perekonomian pada saat tersebut. Karakteristik tersebut berhubungan erat dengan seberapa besar Bank Indonesia

mengendalikan nilai tukar tersebut dengan melakukan penekanan pada unsur *management* atau *floating*-nya.

Sesuai dengan karakteristiknya maka nilai tukar mengambang terkendali pada periode tersebut dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu *managed floating I*, *managed floating II*, dan *crawling band*. Periode 1978-1986 dapat dianggap sebagai periode *managed floating I* di mana unsur manajemen lebih besar dari *floating*. Kondisi tersebut terlihat dari pergerakan nilai tukar nominal yang relatif tetap dan perubahan relatif baru terjadi pada tahun-tahun tertentu, yaitu pada saat Bank Indonesia melakukan devaluasi rupiah. Cukup kuatnya unsur manajemen pada periode tersebut tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang relatif belum berkembang seperti saat ini, sehingga Bank Indonesia tidak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan nilai tukar sesuai dengan target yang diinginkan dalam rangka mengendalikan inflasi dan menjaga daya saing produk-produk ekspor.

Perkembangan selanjutnya dengan semakin terbukanya perekonomian nasional terhadap perekonomian dunia yang ditandai dengan semakin besarnya *capital inflow* ke Indonesia, serta semakin pesatnya perkembangan sektor keuangan dan dunia usaha maka kebijakan nilai tukar *managed floating*, lebih ditekankan pada unsur *floating*-nya sementara unsur pengendaliannya (*managed*) semakin mengecil (periode *managed floating II* / 1987-1992). Dalam periode ini kekuatan pasar semakin besar sehingga unsur *floating* semakin dirasakan perlu mengingat manajemen yang terlalu dominan dapat berakibat *misalignment* pada nilai tukar riil.

Fleksibilitas nilai tukar rupiah semakin ditingkatkan melalui penerapan kebijakan nilai tukar *crawling band* sejak tahun 1992 hingga Agustus 1997. Peningkatan fleksibilitas nilai tukar tersebut telah mendorong

perkembangan pasar valuta asing dalam negeri, yang tercermin dari semakin berkurangnya ketergantungan bank-bank kepada Bank Indonesia dalam melakukan transaksi devisa. Kegiatan transaksi valas yang sebelumnya dilakukan bank dengan Bank Indonesia hampir seluruhnya telah bergeser ke pasar valas antar bank. Disamping itu, sejumlah pelaku transaksi juga semakin meningkat dan produk pasar valuta asing semakin bervariasi.

3. Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas (sejak 14 Agustus 1997)

Sejak pertengahan Juli 1997, nilai tukar rupiah mengalami tekanan-tekanan yang menyebabkan semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD. Tekanan tersebut berawal dari *currency turmoil* yang melanda Thailand yang dengan segera menyebar ke Indonesia dan negara ASEAN sehubungan dengan karakteristik perekonomian yang mempunyai kemiripan. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia antara lain dengan melakukan intervensi baik secara *spot* maupun *forward* untuk sementara memang dapat menstabilkan nilai tukar rupiah.

Namun tekanan depresiatif tersebut semakin meningkat khususnya lagi sejak awal Agustus 1997, di mana rupiah telah menembus Rp 2.650 per 1 USD. Sehubungan dengan itu dan dalam rangka mengamankan cadangan devisa yang terus berkurang maka pada tanggal 14 Agustus 1997, pemerintah memutuskan untuk menghapus rentang intervensi dan menganut sistem nilai tukar mengambang bebas (*flexible exchange rate*).

Penghapusan rentang intervensi ini juga dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan spekulatif terhadap rupiah dan memantapkan pelaksanaan kebijakan moneter dalam negeri. Walaupun Indonesia telah menganut *flexible exchange rate*, namun kegiatan intervensi valas masih

tetap dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan distorsi-distorsi di pasar valuta asing mengingat pasar ini belum sempurna dan kurang rasional.

(Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Volume 1/No.2, Edisi September 1998: 75-78).

Penutup

Dalam sejarahnya, kebijakan pemerintah dalam proses pengendalian nilai tukar mata uang membutuhkan sejumlah cadangan devisa yang memadai. Sedangkan Indonesia adalah negara yang berper-ekonomian kecil tidak memiliki jumlah cadangan devisa yang cukup memadai dan pondasi struktur ekonomi yang tidak cukup kuat. Akibatnya, seperti yang terjadi pada krisis ekonomi tahun 1997, terjadi kepanikan sehingga *rush* valuta asing besar-besaran maka cadangan devisa yang dimiliki segera terkuras. Dalam situasi tersebut saat itu bantuan finansial internasional sangat dibutuhkan. Akan tetapi krisis yang terjadi telah sedemikian parah sehingga dilakukanlah perubahan pada sistem nilai tukar mata uang menjadi lebih fleksibel lagi yaitu *freely floating exchange rate system* (sistem nilai tukar mengambang bebas).

Dalam perjalanannya, sistem mengambang bebas ini justru tidak memberikan dorongan nyata terhadap proses pencapaian tujuan-tujuan ekonomi yang dikehendaki. Terlebih lagi penerapan sistem nilai tukar ini memiliki konsekuensi-konsekuensi ekonomis yang berbeda dengan penerapannya pada negara-negara maju yang telah kuat perekonomiannya (negara berper-ekonomian besar) seperti misalnya terciptanya ketidakpastian nilai tukar karena membiarkan mekanisme pasar yang menentukan nilai keseimbangan mata uangnya sendiri, juga menciptakan ketergantungan yang tinggi pada otoritas

moneter. Karena itulah diperlukan adanya suatu telaah khusus untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem nilai tukar yang tepat untuk negara berper-ekonomian kecil seperti Indonesia.

Daftar Pustaka

- Atmadja, Edwin Surya. 2001. *Floating Exchange Rate System dan Penerapannya Pada Kebijakan Ekonomi di Negara Yang Berper-ekonomian Kecil dan Terbuka*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.3, No.1 Mei 2001, 18-29.
- Goeltom, Miranda S., dan Zulverdi, Doddy. 1998. *Manajemen Nilai Tukar Indonesia dan Permasalahannya*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 1/No.2. Jakarta: Urusan Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI.
- Hady, Dr. Hamdy. 2001. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Keuangan Internasional*. Jakarta: Galia Utama.
- Krugman, Paul R., and Obstfeld, Maurice. 2000. *International Economics: Theory and Practice*. Fifth Edition. New York: Addison-Wesley Publishing Company.
- Lindert, Peter H. Dan Kindleberger, Charles P. 1993. *Ekonomi Internasional*. Penerjemah: Burhanuddin Abdullah. Jakarta: Erlangga.
- Lubis, Abdur-Razzaq dkk., 1998. *Jerat Utang IMF? Sebuah Pelajaran Berharga Bagi Para Pemimpin Bangsa-Khususnya Indonesia (Discredit Interest-Debt!)*, Penerjemah Rofik Suhud. Bandung: Mizan.
- Samuelson, Paul A., dan Nordhaus, William D. 1996. *Makroekonomi*. Penerjemah: Drs. Haris Munandar, Freddy Saragih, SE. M.PAcc., Rudi

- Tambunan, SE. Cetakan ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Tambunan, Tulus. 1998. *Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sulasmiyati, Sri. 1999. *Alternatif Kebijakan Sistem Nilai Tukar Mata Uang Dalam Masa Krisis di Indonesia*. Skripsi. Malang: Unibraw